**KEBIJAKAN MONETER DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

JURNAL :

Sebagai salah satu tugas Ujian Akhir Semester pada mata kuliah

Perekonomian Indonesia

Disusun Oleh :

1. Alfitria	1851010111
2. Cindy Novitasari	1851010110
3. Ray Dwiki Syahputra	1851010112

Kelas : B / Kelompok 8 / Semester 5

Dosen pengampu : Dr. Gj. Heni Noviarita, SE, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Alfitria (1851010111)

Cindy Novitasari (1851010110)

Ray Dwiki Syahputra (1851010112)

UIN Raden Intan Lampung, Jl. Letnan Kolonel H. Endro

Suratmin, Sukarame Kota Bandar Lampung, Lampung, 35131

ABSTRACT

The development of the rate of economic growth in a region can be said to be the economic growth that is formed through various types of economic sectors that occur indirectly which describes the occurrence of levels of economic growth. in order to achieve high but stable economic growth, monetary policy is needed. The objective of monetary policy is to achieve and maintain the stability of the rupiah value. This objective is as stated in Law no. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, as amended by Law no. 3 of 2004 and Law no. 6 of 2009 in article 7. The purpose of this journal is to know monetary policy from an Islamic perspective. This is interesting to discuss because there are fundamental differences between modern monetary policy and monetary policy in an Islamic economic perspective.

Keywords: *Monetary System, Islamic Economy*

ABSTRAK

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang dibentuk melalui berbagai jenis sektor ekonomi yang terjadi secara tidak langsung yang menjabarkan mengenai terjadinya tingkatan pertumbuhan ekonomi. agar mampunya tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi stabil maka diperlukannya kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana

diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Adapun tujuan jurnal ini yaitu mengetahui kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Hal ini menarik untuk dibahas karena ada perbedaan mendasar antara kebijakan moneter modern dengan kebijakan moneter dalam perpektif ekonomi Islam.

Kata kunci: *kebijakan moneter, ekonomi Islam.*

PENDAHULUAN

Dalam setiap penyelenggaraan negara, pemerintah menetapkan suatu keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan yang di dalamnya tersirat supaya terwujud kesejahteraan seluruh masyarakat. Kebijakan moneter ditetapkan dalam rencana pembangunan otoritas moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral yaitu dengan cara mengubah besaran moneter dan suku bunga serta pelaksanaannya dilakukan oleh otoritas moneter dan lembaga keuangan.¹ Kebijakan moneter berperan sangat penting dalam perekonomian, kehadirannya diharapkan dapat berfokus pada stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan *output*.²

Kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memengaruhi variabel-variabel finansial, seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan

nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan memengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitas ekonomi.

Kebijakan moneter ini merupakan faktor penting dalam perekonomian. Namun, perbedaan sistem ekonomi yang berlaku, akan memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter dengan sistem ekonomi Islam.

Sistem moneter Islam merupakan sub sistem dari sistem ekonomi Islam yang tujuan yang hendak dicapai dalam moneter Islam diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. *Maqashid Syariah* menegakkan keadilan (*Iqamah al 'Adl*), yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan

¹ Wayan Sudirman, *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hal.1-2

² Adhitya Wardhono dan dkk, *Perilaku Kebijakan Bank Sentral* (Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2019), hal.21

kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu.

Dalam hal ini, kebijakan moneter menjadi faktor penting dalam menstabilisasi siklus perekonomian. Kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil melalui mekanisme transmisinya pada harga dan output, yang pada akhirnya membawa efek multiplier pada variabel-variabel lain, seperti tenaga kerja. Sebaliknya, sistem moneter yang *unreliable* akan membawa pada masalah inflasi dan depresi.

Dengan demikian, penulisan ini dibuat dengan tujuan menganalisis peranan kebijakan moneter berbasis perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain

dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.³

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dilakukan dengan pengambilan data dari berbagai buku serta jurnal ilmiah yang terkait dengan pembahasan ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang dari pada sektor

³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hal.330.

riil. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan dari pada sektor riil.⁴

Definisi lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Kebijakan moneter menurut konvensional merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial, seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang.⁵

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Besaran moneter terdiri atas uang primer (M0), uang beredar dalam

artian sempit (M1), dan uang beredar dalam artian luas (M2).⁶

Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat. Dengan begitu, waktu memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal mungkin, di mana waktu tersebut sebenarnya menghambat *velocity*. Dengan kata lain, penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah serta ketentuan lainnya berkaitan dengan arus uang di masyarakat akan semakin meningkatkan *velocity* dalam perekonomian.⁷

⁴ Nur Latifah, Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Modernisasi* Vol. 11, No. 2, (2015), hal.124

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal.11

⁶ Adhitya Wardhono, *op.cit.*, hlm.22-23.

⁷ Aji Prasetyo, Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam, *Majalah Ekonomi* Vol.XXII, No. 1, (2017): 106.

Salah satu bentuk kebijakan moneter adalah dengan mengendalikan jumlah uang beredar agar tidak beredar dalam jumlah yang berlebihan. Apabila jumlah uang yang beredar banyak, akan menyebabkan terjadinya peningkatan harga-harga (inflasi) yang nantinya dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:⁸

1. Kebijakan moneter ekspansif
(*Monetary expansive policy*)

Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*).

2. Kebijakan Moneter Kontraktif
(*Monetary contractive policy*).

Kebijakan Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*).

Penulis lain membagi Kebijakan Moneter menjadi dua golongan, yakni :⁹

a. Kebijakan moneter kuantitatif

Yaitu langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa deflasi penawaran uang perlu ditambah. Langkah ini akan menurunkan suku bunga dan penurunan ini selanjutnya akan menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran berkurang. Dalam masa inflasi pengeluaran masyarakat adalah melebihi penawaran barang-

⁸ Nur Aini Latifah, *op.cit.*, hlm.125

⁹ *ibid*, hlm.126

barang yang tersedia dalam penawaran. Oleh sebab itu pengeluaran agregat perlu dikurangi melalui pengeluaran dalam penawaran uang dan kenaikan suku bunga. Perubahan tersebut akan menurunkan pengeluaran agregat sehingga terdapat keseimbangan di antara pengeluaran dalam ekonomi dengan jumlah penawaran masing-masing.

- b. Kebijakan moneter yang kualitatif
 - 1) Pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan.
 - 2) Pembujukan moral, yaitu bank sentral menghimbau serta membujuk kepada bank-bank untuk melakukan suatu hal yang diarahkan, misalnya pada saat terlalu banyak jumlah uang beredar, bank sentral bisa membujuk kepada bank untuk mengurangi penyaluran kreditnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi pemerintah dan sistem bank dalam menentukan jumlah

penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Tingkat bunga tidak mempunyai peranan dalam menentukan jumlah uang yang ditawarkan pada suatu waktu tertentu. Perubahan tingkat bunga dalam analisis parsial saat ada pergeseran baik permintaan dan penawaran uang.

Dalam buku *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application* oleh Hossein Askari, Zamir Iqbal, Abbas menyebutkan bahwa “*it’s important to note that monetary policy acts indirectly, in the sense that it relies on the banking sector to increase or decrease lending to the private sector and on the private sector to act in the way the monetary authorities hope for.*” Yang artinya yaitu penting untuk dicatat bahwa kebijakan moneter bertindak secara tidak langsung, dalam arti kebijakan moneter bergantung pada sektor perbankan untuk menambah atau mengurangi pinjaman ke sektor swasta dan pada sektor swasta untuk bertindak dengan cara yang diharapkan oleh otoritas moneter.¹⁰

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting kebijakan publik

¹⁰ Hossein Askari, *Intoduction to Islamic Economics: Theory and Application* (Singapore: John Wiley and Sons Singapore, 2015).

dalam sistem moneter ekonomi, baik konvensional maupun Islam. Namun, perbedaan yang mendasar terletak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam.

Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai

fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework* (ITF). Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan (*overriding objective*). Bank Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya.

Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan

utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.¹¹

Prinsip-Prinsip Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dalam islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut:¹²

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut.
2. Manusia merupakan pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya

yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.

4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
5. Kekayaan harus diputar.
6. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.
7. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang termasuk didalamnya unga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharam ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Prinsip-prinsip lain yang ada dalam kebijakan moneter secara sehat yaitu:

¹¹ Bank Indonesia, "Tujuan Kebijakan Moneter," 2020, diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 11:33 <https://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/Default.aspx>.

¹² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, 2001), hal.28.

- a. Mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan (*overriding objective*)
Yaitu sasaran inflasi, sebagai kontribusi pokok kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sasaran inflasi ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruhnya (trade-off) dengan pertumbuhan ekonomi.
- b. Kebijakan moneter bersifat antisipatif (*forward looking*)
Yaitu dengan mengarahkan kebijakan moneter yang ditempuh saat ini diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pada periode yang akan datang mengingat adanya efek tunda (lag) kebijakan moneter.
- c. Mengikatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter (*constrained discretion*)
Dalam penetapan respon kebijakan moneter, bank sentral mempertimbangkan prakiraan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta berbagai variabel lain.

Termasuk pertimbangan mengenai kebijakan ekonomi Pemerintah dalam kerangka koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan makro lain.

- b. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat (*good governance*),
Yaitu berkejelasan tujuan, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas.

Instrumen-Instrumen Kebijakan Moneter

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal), penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketuluan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip berbeda dengan yang konvensional terutama

dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.

Instrumen moneter keuangan syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi *underlying*-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (*bank rates*, *discount rate*, *open market operation* dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti *Reserve Requirement*, *overall and*

selecting credit ceiling, *moral suasion* and *change in monetary base*. Operasi pasar terbuka dapat juga dikendalikan melalui bentuk sekuritas berdasarkan ekuitas (*equity based type of securities*).

Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan *discount rate* tersebut. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi.

Lebih lanjut menurut Chapra, mekanisme instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup enam elemen yaitu:¹³

1. Target Pertumbuhan *M* dan *Mo*. Setiap tahun bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang (*M*) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional.

¹³ Umer M. Chapra, *Terj. Towards a Just Monetary System* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Pertumbuhan *M* terkait erat dengan pertumbuhan *Mo* (*high powered money*: uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral). Bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan *Mo* yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial; dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi, dan sasaran dalam perekonomian Islam. *Mo* yang disediakan untuk bank-bank komersial terutama dalam bentuk *mudharabah* harus digunakan oleh bank sentral sebagai instrumen kualitatif dan kuantitatif untuk mengendalikan kredit.

2. Saham Publik terhadap Deposito Atas Unjuk/Uang Giral (*Public Share of Demand Deposit*)
Dalam jumlah tertentu *demand deposit* bank-bank komersial (maksimum 25%) harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan.

3. Cadangan Wajib Resmi (*Statutory Reserve Requirement*)

Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. *Statutory reserve requirements* membantu memberikan jaminan atas deposit sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, bank sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial ini.

4. Pembatasan Kredit (*Credit Ceilings*)

Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antarbank komersial.

5. Alokasi Kredit yang Berorientasi pada Nilai.

Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi

produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi risiko dan biaya yang harus ditanggung bank.

6. Teknik Lain.

Teknik kualitatif dan kuantitatif di atas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan; termasuk diantaranya *moral suasion* atau himbauan moral. Dari literatur perbankan Islam, beberapa alternatif instrumen kebijakan moneter yang dapat dipakai bank sentral antara lain:

a. *Government Deposits*

Kewenangan bank sentral untuk memindahkan *demand deposit* pemerintah yang ada di bank sentral dari dan ke bank komersial untuk memberi

dampak langsung pada cadangan bank-bank komersial.

b. Mengatur nilai tukar mata uang asing bersama-sama bank semua pada cadangan bank-bank Komersial

Persetujuan tukar menukar mata uang asing secara bersama-sama.

c. *Common Pool*

Langkah ini diambil atas dasar semangat kerja sama yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposit dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk meringankan persoalan likuiditas yang dialami suatu bank.

d. *Equity-Base Instruments*

Jual beli surat berharga, saham, dan sertifikat bagi hasil berdasarkan penyertaan. Instrumen ini dapat menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar.

e. *Change In The Profit and Loss Sharing Ratio*

Bank sentral mengeluarkan variasi rasio bagi hasil untuk aktivitas *mudharabah* untuk bank komersial dan untuk para deposan kepada wirausahawan.

f. *Refinance Ratio* (Rasio Pembiayaan Kembali)

Menurut Dr. Sidiqi sebagai sesuatu pembiayaan yang diberikan bank sentral kepada bank komersial sebagai bagian dari *qordhul hasan* yang diberikan oleh mereka.

g. *Lending Ratio*

Rasio pemberian pinjaman merupakan persentase uang giral yang dapat dipinjamkan oleh bank sentral sebagai bagian dari *qordhul hasan* yang diberikan oleh mereka bagi nasabah mereka.

Kesehatan sistem moneter dalam keuangan syariah tidak akan dipengaruhi oleh suku bunga yang tidak menentu dan sukar ditebak dan tidak pula oleh kebutuhan untuk menstabilkannya. Uang beredar akan diatur oleh bank sentral menurut

kebutuhan sektor riil perekonomian dan sasaran-sasaran masyarakat Muslim. Pertumbuhan dalam *M* dapat diatur untuk merealisasikan sasaran kesejahteraan berbasis luas dan suatu laju pertumbuhan optimal, tetapi realistis dalam konteks kestabilan harga. Target dalam *M* ini akan dicapai dengan menghasilkan pertumbuhan yang diinginkan dalam uang berdaya tinggi melalui suatu kombinasi defisit fiskal dan pinjaman *mudharabah* oleh bank sentral kepada lembaga-lembaga keuangan.

Implementasi dari Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Adapun contoh tentang penerapan instrument kebijakan moneter Islam di beberapa negara termasuk Indonesia:¹⁴

1. Sudan

Berikut ini adalah instrument-instrumen moneter yang di gunakan Bank Sentral Sudan (BOS) dalam oprasionalnya :

- a. *Reserve Requirement*, setiap bank harus menyalurkan pada simpanan BOS sedikitnya 20% (100% untuk simpanan mata uang asing) dari total

¹⁴ Luqmanul Hakiem Ajuna, "Kebijakan Moneter Syariah," *Jurnal Al-Buhuts* Vol.13, No. 1 (2017): 112.

dana simpanan masyarakat (dengan mengecualikan simpanan investasi) yang di refleksikan pada neraca akhir bulan bank tersebut.

- b. Bank-bank konvensional harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana tabungan dalam bentuk mata uang lokal.
- c. Pelafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti:
 - 1) Pertanian
 - 2) Ekspor
 - 3) Perindustrian
 - 4) Pertambangan dan energy
 - 5) Transportasi dan pergudangan
 - 6) Professional, pengrajin, dan bisnis keluarga ukuran kecil
 - 7) Perumahan rakyat
 - 8) Investasi pada pasar saham resmi kharoun

Di mana minimum 90% dari dana kredit bank harus di alokasikan pada sector non-prioritas, termasuk perdagangan domestik dan jasa

yang tidak berhubungan dengan sektor prioritas.

- d. *Foreign exchange operation* sebagai alat BOS untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang (bukan untuk fungsi control likuiditas).
- e. OMO dengan menggunakan instrumen:
 - 1) *Central Bank Mushraka Certificate* (CMC) dimana fungsi sekuritas bank sentral konvensional sebagai pengendali likuiditas uang terpenuhi dengan keberadaan sekuritas yang berdasarkan sistem bagi hasil. CMC mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) Tidak mempunyai tanggal jatuh tempo
 - b) Berbasiskan akuitas (equity-based) dalam jumlah tertentu dari investasi BOS dan pemerintah di bank – bank konvensional.

f. *Government Musharaka Certificate* (GMC) Secara garis besar, kegunaan GMC adalah:

- 1) Pembiayaan anggaran
- 2) Instrument OMO bagi BOS
- 3) Mobilisasi tabungan nasional
- 4) Mendorong investasi
- 5) Sebagai alat pengembangan pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam

g. *Ijarah certificate* (sukuk) yaitu suatu sekuritas yang dimaksudkan untuk memobilisasi simpanan jangka pendek yang digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang yang dilakukan melalui sekuritisasi aset pemerintah yang berwujud seperti lapangan terbang, jalan raya, bangunan, pabrik, rumah sakit, dll.

2. Iran

- a. *Reserve requirement ratio* antara 10%-30%
- b. *Adjusted open market operation* pada dasarnya omo tidak dapat efektif di gunakan

pada negara yang pasar keuangannya /finansialnya belum berkembang.

c. *Discount rate* karena adanya pelarangan terhadap riba, maka instrument jenis ini tidak di gunakan seluas seperti pada sistem perbankan konvensional.

d. *Credit ceiling* untuk mengendalikan penciptaan uang, pertumbuhan likuiditas oleh otoritas moneter.

3. Indonesia

Bank yang berdasarkan syariah Islam, BI menjalankan fungsinya bank sentral dengan instrumen-instrumen sebagai berikut:

- a. Giro Wajib Minimum (GWM): biasa dinamakan juga *statutory reserve requirement*, adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan Persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-

hatian perbankan (*Prudential Banking*) serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang.

Besaran GWM adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR (rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata harian dalam satu masa laporan untuk periode masa laporan sebelumnya. Sedangkan dana pihak ketiga yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Giro wadiah;
- 2) Tabungan mudharabah;
- 3) Deposito investasi mudharabah; dan
- 4) Kewajiban lainnya.

Dana Pihak Ketiga dalam IDR tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan BPR. Sedangkan Dana Pihak Ketiga dalam mata uang asing meliputi kewajiban kepada pihak ketiga, termasuk

bank dan Bank Indonesia yang terdiri atas :

- a) Giro wadiah;
- b) Deposito investasi mudharabah; dan
- c) Kewajiban lainnya.

BI mengenakan denda terhadap kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan mingguan yang digunakan untuk menentukan GWM. Bank yang melakukan pelanggaran juga terkena sanksi.

- b. Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (Sertifikat IMA): yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana.

Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan

format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh BI. Pemindahtanganan Sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahtangkannya kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Pembayaran dilakukan oleh bank syariah penerbit sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil (yang dibayarkan awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia, atau transfer elektronik).

- c. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI): yaitu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.

Dalam operasionalnya, SWBI mempunyai nilai nominal minimum Rp 500 juta dengan jangka waktu dinyatakan dalam hari (misalnya: 7 hari, 14 hari, 30 hari). Pembayaran atau pelunasan SWBI dilakukan melalui debit/kredit rekening giro di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo, dana akan dikembalikan bersama bonus yang ditentukan berdasarkan parameter Sertifikat IMA.

Peranan Uang dalam Sistem Moneter Islam di Indonesia

Dalam ekonomi konvensional, fungsi uang disamakan dengan komoditi sehingga menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi dan pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi sektor riil dan moneter.

Terdapat perbedaan dalam sistem moneter konvensional dengan sistem moneter Islam. Perbedaan tersebut diantaranya adalah dalam hal

instrumennya. Di dalam moneter konvensional instrumen yang digunakan adalah suku bunga, sedangkan instrumen dalam moneter Islam berbasis pada bagi hasil (*Loss and Profit Sharing*). Fokus kebijakan moneter konvensional adalah mengatur jumlah uang beredar sedangkan kebijakan moneter Islam berfokus pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi¹⁵. Hal tersebut sejalan dengan konsep uang dalam ekonomi Islam bahwa uang harus mengalir (*flow concept*) yang digunakan untuk mendukung berputarnya sumber daya ekonomi.¹⁵

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*) bukan *privat goods*. Karena uang berfungsi sebagai *public goods* maka uang harus mengalir dalam perekonomian dan tidak boleh ditimbun. Sebaliknya jika uang diperlakukan sebagai *privat goods* maka memberikan konsekuensi terjadinya penimbunan pada uang itu sendiri. Sehingga karena uang dalam perspektif moneter Islam adalah sebagai *public goods* maka Dalam uang harus bersifat *flow concept* artinya uang harus mengalir dalam perekonomian agar

perekonomian tidak terhenti. Penimbunan uang bisa berdampak pada macetnya kegiatan perekonomian.

Sistem moneter ekonomi berfungsi sebagai pengaturan jumlah uang beredar diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Pertama, kebijakan Moneter Ekspansif (*Monetary Expansive Policy*) yaitu suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang beredar. Kedua, kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*) atau kebijakan uang ketat (*tight money policy*) yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar.¹⁶

Lembaga perbankan syariah mempunyai sifat universal dan multi guna serta tidak semata-mata merupakan bank komersial. Ia merupakan perpaduan antara bank komersial, bank investasi, investasi kepercayaan dan institusi pengelola investasi (*investment-management institutions*), yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini maka

¹⁵ Sri Mulyani, Uang Dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 62.

¹⁶ Aji Prasetyo, *op.cit.*, hal.109.

perbankan syariah akan jauh dari perilaku *borrowing short* dan *lending long*. Karena itu ia kokoh terhadap ancaman krisis dibanding perbankan konvensional. Berdasar fakta itu pula, maka kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian riil secara seimbang.

Kebijakan Moneter Saat Pandemi Covid-19

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 12-13 Oktober 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,75%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020, guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Di samping keputusan tersebut, Bank

Indonesia menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar;
2. Memperkuat strategi operasi moneter guna memperkuat stance kebijakan moneter akomodatif;
3. Mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing melalui pengembangan infrastruktur sarana penyelenggara transaksi berbasis sistem elektronik (*Electronic Trading Platform/ETP*) dan lembaga sentral kliring, novasi, dan transaksi (*Central Counterparty/CCP*);
4. Memperkuat implementasi kebijakan untuk mendorong UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan digitalisasi sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI);
5. Memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui penggunaan instrumen pembayaran digital, kolaborasi

bank, *fintech*, dan *e-commerce* untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

Bank Indonesia akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mempercepat program PEN dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Keadaan moneter pada saat ini meliputi:

- a. Perbaikan perekonomian global berlanjut sesuai prakiraan sebelumnya.
- b. Pertumbuhan ekonomi domestik secara perlahan juga membaik, terutama didorong stimulus fiskal dan perbaikan ekspor.
- c. Ketahanan sektor eksternal Indonesia pada triwulan III 2020 tetap terjaga, di tengah dinamika penyesuaian aliran modal global.
- d. Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia.
- e. Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai.
- f. Sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian.
- g. Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat.
- h. Ketahanan sistem keuangan tetap kuat, meskipun risiko dari meluasnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati.
- i. Transaksi Sistem Pembayaran baik tunai maupun nontunai menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbaikan ekonomi,

disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.¹⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan.

Tujuan kebijakan moneter yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7.

Kebijakan moneter dalam islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai yaitu: Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut, Manusia merupakan pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan

pemilik yang sebenarnya, Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung, Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun, Kekayaan harus diputar, Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan, dan Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Instrumen moneter keuangan syariah adalah hukum syariah. Tujuan kebijakan moneter yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Adapun contoh tentang penerapan instrument kebijakan moneter Islam di beberapa negara yaitu negara Sudan, Iran, dan Indonesia.

Pelaksanaan ekonomi konvensional, fungsi uang disamakan dengan komoditi sehingga menyebabkan timbulnya pasar

¹⁷ Bank Indonesia, "Tinjauan Kebijakan Moneter Oktober 2020," 2020, diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 19.05 di <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Oktober-2020.aspx>.

tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi dan pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi sektor riil dan moneter.

Dengan keadaan pandemi covid-19 Bank Indonesia melakukan langkah sebagai berikut dalam menjalankan kebijakan moneter seperti: melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar; memperkuat strategi operasi moneter; mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing; memperkuat implementasi kebijakan untuk mendorong UMKM; dan memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital

Saran

Saran kepada penelitian selanjutnya agar dapat melanjutkan dengan penelitian pengaruh instrumen yang digunakan dalam sistem moneter Islam di dalam perekonomian sehingga kita dapat mengetahui serta memahami bagaimana pengaruh instrumen moneter

Islam (bagi hasil) terhadap sektor riil yang dapat berdampak kepada perekonomian.

TINJAUAN PUSTAKA

Ajuna, Luqmanul Hakiem. 2017. Kebijakan Moneter Syariah. *Jurnal Al-Buhuts* Vol.13, No. 1.

Askari, Hossein. 2015. *Intoduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Singapore: John Wiley and Sons Singapore.

Bank Indonesia. 2020. Tinjauan Kebijakan Moneter Oktober 2020. Diakses pada 20 November 2020 di <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Oktober-2020.aspx>.

———. 2020. Tujuan Kebijakan Moneter. Diakses pada 20 November 2020 di <https://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/Default.asp>.

Chapra, M. Umer. 2000 *Terj. Towards a Just Monetary System*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Karim, Adiwarmman Azwar. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta:IIIT.
- Latifah, Nur. 2015. Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Modernisasi* Vol.11, No. 2.
- Mulyani, Sri. 2020. Uang Dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol.2, No. 1: 52–67.
- Prasetyo, Aji. 2017. Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam. *Majalah Ekonomi* Vol. XXII, No. 1.
- Soemitra, Andri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudirman, Wayan. 2011. *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Wardhono, Adhitya, dan dkk. *Perilaku Kebijakan Bank Sentral*. 2019. Jawa Timur: Pustaka Abadi.
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif , Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.